

UPAYA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Melalui Penyempurnaan Arsitektur Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting bagi suatu negara. Menurut UU nomor 18 tahun 2012, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam khasanah internasional, ketahanan pangan suatu negara dapat diukur melalui *Global Food Security Index* (GFSI) yang berorientasi pada aspek keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam.

Berdasarkan GFSI, ketahanan pangan Indonesia terus mengalami perbaikan, dari peringkat 75 (2012) menjadi peringkat 69 (2021). Peningkatan peringkat pada tahun 2021 terutama dipengaruhi skor pada aspek keterjangkauan (*affordability*) dan ketersediaan (*availability*). Namun demikian, penurunan terjadi pada aspek kualitas dan keamanan pangan (*quality and safety*), sedangkan aspek ketahanan sumber daya alam (*natural resources*) cenderung landai. Kualitas dan keamanan pangan masih menjadi masalah karena masih terdapat 34% penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi dan 68,8% tidak mampu membeli pangan sehat. Konsumsi pangan yang tidak bergizi menyebabkan produktivitas SDM yang hilang mencapai lebih dari US\$5 miliar pada tahun 2016.

Perbaikan peringkat ketahanan pangan menurut GFSI tidak terlepas dari adanya dukungan Pemerintah melalui APBN. Berdasarkan *data series* anggaran tematik, anggaran ketahanan pangan meningkat dari Rp86,5 triliun (2018) menjadi Rp92,3 triliun (APBN 2022).

Namun demikian, cakupan anggaran tersebut belum memasukkan perlindungan sosial, program stunting, subsidi bunga KUR, subsidi energi, dan insentif untuk pangan. Berdasarkan estimasi *budget tagging* menurut metode MAFAP FAO yang dilakukan oleh World Bank (2022), dukungan ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mencapai Rp180 triliun. Saat ini, hasil *budget tagging* dengan MAFAP FAO tersebut masih dalam proses verifikasi Tim Kajian Ketahanan Pangan Kementerian Keuangan.

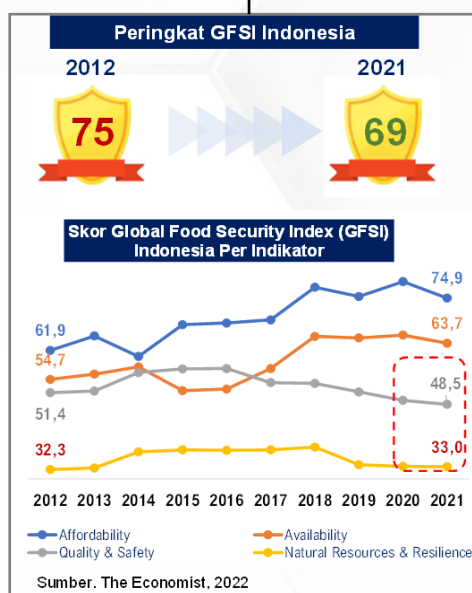
Berdasarkan capaian dan tantangan tersebut di atas, upaya sistematis dalam perbaikan ekosistem pengelolaan pangan nasional yang lebih baik diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan yang ada. Perbaikan yang dapat dilakukan secara bertahap diantaranya (1) Aspek ketersediaan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing melalui modernisasi, diversifikasi, dan logistik yang efisien; (2) Aspek keterjangkauan melalui

integrasi program perlindungan sosial ke dalam kebijakan pertanian dan tata kelola lebih efisien; (3) Aspek pangan sehat berkualitas dan aman melalui peningkatan nutrisi dan penguatan perlindungan konsumen; (4) Aspek keberlanjutan ekosistem melalui penerapan praktek pertanian dan perikanan berkelanjutan serta perlindungan dari risiko cuaca dan hama; serta (5) Aspek kelembagaan melalui penguatan sinergi antar K/L, penguatan Bapanas, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkesinambungan.

Sementara itu dalam jangka pendek penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan terutama dengan memfokuskan anggaran untuk memastikan *supply* dapat tercapai (pengendalian hama, dampak cuaca dan penyuluhan). Upaya ini diselaraskan dengan pemutakhiran data penduduk miskin, sistem pemantauan harga pangan yang akurat dan *up to date*, Sistem Nasional Neraca Komoditas yang akurat dan terkini, proses importasi pangan yang lancar dan *agile*. Langkah-langkah tersebut didukung oleh sinergi dan kolaborasi antar K/L dan Pemda, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, serta komitmen anggaran reformasi pangan.

Strategi perbaikan juga menyasar pada program prioritas nasional yaitu Program *Food Estate* antara lain perlu adanya pendekatan berbasis pasar, mengatasi hambatan rantai-nilai (*supply chain*), dan adopsi praktik berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal di setiap tahap siklus proyek untuk mendorong penerimaan (*acceptance*) dan kepemilikan (*ownership*) atas program *Food Estate*.



Pembangunan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kerjasama internasional. Saat ini, Indonesia bersama Jerman, Denmark, Senegal, Barbados dan Bangladesh menjadi *Champion Country* dalam *Global Crisis Response Group* (GCRG) on Food, Energy and Finance yang dibentuk oleh PBB. Salah satu peran GCRG adalah menyuarakan kepada lembaga keuangan internasional dalam mengimplementasikan komitmen Rencana Aksi Mengatasi Kerawanan Pangan.

REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet Lt. 13
Jl. DR Wahidin No. 1
Jakarta Pusat
Telp: (021) 3849315
Email:
penyusunan.apbn@gmail.com

Terbatas untuk internal DJA



Realisasi APBN s/d 31 Desember 2022

URAIAN	2021		2022		% thd Perpres 98/2022	Growth (%)
	Realisasi	APBN	Perpres 98/2022	Realisasi Sementara		
A. PENDAPATAN NEGARA	2.011,3	1.846,1	2.266,2	2.626,4	115,9	30,6
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.006,3	1.845,6	2.265,6	2.622,9	115,8	30,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.547,8	1.510,0	1.784,0	2.034,5	114,0	31,4
2. PNBPN	458,5	335,6	481,6	588,3	122,2	28,3
II. Penerimaan Hibah	5,0	0,6	0,6	3,5	610,8	(29,3)
B. BELANJA NEGARA	2.786,4	2.714,2	3.106,4	3.090,8	99,5	10,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.000,7	1.944,5	2.301,6	2.274,5	98,8	13,7
1. Belanja K/L	1.190,8	945,8	945,8	1.079,3	114,1	(9,4)
2. Belanja Non K/L	809,9	998,8	1.355,9	1.195,2	88,2	47,6
II. Transfer Ke Daerah	785,7	769,6	804,8	816,2	101,4	3,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(431,6)	(462,2)	(434,4)	(78,0)	18,0	(81,9)
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(775,1)	(868,0)	(840,2)	(464,3)	55,3	(40,1)
<i>% thd PDB</i>	<i>(4,57)</i>	<i>(4,85)</i>	<i>(4,50)</i>	<i>(2,38)</i>		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	871,7	868,0	840,2	583,5	69,5	(33,1)
SiLPA/(SiKPA)	96,7	-	-	119,2		

MAKRO EKONOMI

KILAS BALIK PEREKONOMIAN TAHUN 2022 DAN TANTANGAN DI TAHUN 2023

Dinamika perekonomian global cenderung mengalami fluktuasi yang sangat *volatile* di tahun 2022. Di saat pandemi Covid-19 sudah terkendali, di sisi lain tekanan terhadap perekonomian dunia bergeser dengan terjadinya lonjakan harga komoditas dan inflasi dengan volatilitas yang cukup tinggi. Meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang diikuti dengan pemberlakuan berbagai sanksi negara-negara barat terhadap Rusia juga turut memacu peningkatan inflasi yang semakin persisten. Tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi, tensi geopolitik, serta disrupsi rantai suplai mendorong kenaikan harga komoditas, terutama energi dan pangan dunia seperti minyak mentah, batubara, gas alam, CPO, serta gandum yang sempat meningkat hingga di atas 100%. Namun, moderasi harga komoditas mulai terjadi pada akhir tahun 2022 didorong dengan perbaikan suplai serta ekspektasi terjadinya pelemahan perekonomian dunia.

Meskipun secara end of point (EoP) di tahun 2022 harga batubara masih berada di posisi US\$404,2/MT atau naik 157%, harga komoditas lain mulai menunjukkan penurunan, seperti minyak Brent yang mencapai US\$85/barel atau naik 8%, gandum yang mencapai US\$792/bushels atau naik 4,5%, bahkan CPO mengalami penurunan sebesar 27% atau mencapai US\$915,4/T.

Lonjakan harga komoditas dunia mendorong terjadinya kenaikan inflasi dunia yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Inflasi AS sempat mencapai 9,1% (tertinggi sejak tahun 1981), Eropa yang mencapai 10,6% (tertinggi sejak tahun 1997), serta Inggris yang mencapai 11,1% (tertinggi sejak tahun 1981). Tekanan inflasi yang tinggi tersebut memicu bank sentral negara-negara melakukan pengetatan moneter agresif untuk meredam tekanan inflasi tersebut dan menjaga perekonomian negaranya. Sepanjang tahun 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga

acuan sebesar 425 bps (basis poin), dan diikuti beberapa bank sentral negara lain, seperti Inggris yang menaikkan sebesar 325 bps, Eropa sebesar 250 bps, termasuk Indonesia sebesar 200 bps. Pengetatan moneter AS yang agresif berimbas terhadap menguatnya indeks dolar AS yang memicu meningkatnya volatilitas di pasar keuangan dunia dengan terjadinya depresiasi mata uang negara dunia terhadap dolar AS.

Di tengah tekanan dinamika perekonomian global, kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2022 justru menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat secara signifikan dengan tumbuh pada kisaran 5% dalam tiga triwulan tahun 2022. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh menguatnya tingkat konsumsi masyarakat yang didukung dengan stabilitas harga domestik, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program-program perlinsos melalui peran APBN sebagai *shock absorber*. Selain itu, perdagangan internasional Indonesia juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan tumbuhnya ekspor-impor Indonesia yang didukung oleh daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan. Kuatnya pemulihan perekonomian juga didukung oleh inflasi domestik yang terkendali yang mencapai 5,5%, relatif moderat dibandingkan negara-negara lain yang didukung oleh kebijakan stabilisasi harga, koordinasi TPIP-TPID, serta optimalisasi APBN sebagai *shock absorber*. Dengan mempertimbangkan berbagai indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diperkirakan masih tumbuh kuat di level 5,3%.

Meskipun mencatatkan kinerja positif di tahun 2022, perekonomian Indonesia di tahun 2023 akan dihadapkan dengan tantangan global yang masih sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan di tahun 2023 dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,7% sebagaimana proyeksi IMF dalam WEO bulan Oktober 2022. Bahkan IMF memperkirakan 43% negara atau 31 dari 72 negara akan mengalami resesi di tahun 2022/2023. Di sisi lain, tingginya inflasi dunia diperkirakan masih belum sepenuhnya turun di tahun 2023. Inflasi dunia tahun 2023 diperkirakan masih akan berada pada level 6,5% dari sebelumnya yang mencapai 8,8% di tahun 2022. Pengetatan moneter juga masih akan dilakukan di tahun 2023 meskipun tidak akan seagresif di tahun 2022. Perlambatan perekonomian global berpotensi menyebabkan terjadinya moderasi harga komoditas global. Di satu sisi, moderasi harga komoditas berdampak positif terhadap berkurangnya tekanan inflasi, namun di sisi lain dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023 seiring dengan berkurangnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan ekspor, laju investasi diproyeksikan akan tertahan dipengaruhi potensi penurunan harga komoditas dan kecenderungan *wait and see* di tahun politik. Meskipun demikian, optimisme pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2023 masih akan terjadi meskipun diperkirakan akan lebih moderat, dengan kisaran 4,8-5,3% dengan tetap antisipatif terhadap gejolak ekonomi global.

PENDAPATAN NEGARA

"Kinerja Pendapatan Negara selama Tahun 2022 mampu melebihi target dengan laju pertumbuhan signifikan"

Pendapatan negara pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan double digit sebesar 30,6% (yoy) atau mencapai Rp2.626,4 triliun. Peningkatan tersebut utamanya dikontribusikan dari sumber penerimaan utama yang berasal dari perpajakan dan PNPB. Penerimaan perpajakan mampu tumbuh 31,4% (yoy) yang dikontribusikan pertumbuhan hampir semua jenis perpajakan. Kinerja tersebut dipengaruhi terutama oleh perbaikan ekonomi domestik, dampak kebijakan (UU HPP), serta kenaikan harga komoditas. Sementara itu, PNPB juga mampu meningkat sebesar 28,3% (yoy) dipengaruhi di antaranya oleh peningkatan harga minyak bumi dan mineral batu bara. Di sisi lain, hibah 2022 terealisasi sebesar Rp3,5 triliun terdiri dari Rp0,6 triliun dari hibah terencana dan Rp2,9 triliun utamanya merupakan hibah langsung dari dalam negeri (Pemda) yang disalurkan antara lain kepada Kemenhan, Polri, dan Kemenag.

PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2022 SURPLUS RP231,8 TRILIUN DIPENGARUHI PERBAIKAN EKONOMI DOMESTIK, EFEKTIVITAS UU HPP, DAN KENAIKAN HARGA KOMODITAS

Penerimaan perpajakan selama tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114,0% dari target Perpres 98/2022. Capaian tersebut tumbuh 31,4% dari tahun lalu dengan dukungan dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak menyumbang Rp1.716,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022. Capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan positif dari mayoritas jenis pajak utama terutama PPh 21, PPh Badan, PPN DN dan PPN Impor. PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Selanjutnya, PPh Badan tumbuh signifikan dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Selain itu, PPN DN tumbuh seiring dengan peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, penyesuaian tarif, dan perluasan basis pajak. Sementara PPN impor tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas impor selama tahun 2022. Jika dilihat secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama juga mengalami peningkatan khususnya sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan. Sektor Industri dan Perdagangan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas. Sementara itu, Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2022 diantara sektor lainnya dipengaruhi permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang.

Selanjutnya, Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai sebesar Rp317,8 triliun atau 106,3% target Perpres 98/2022. Kinerja tersebut mampu tumbuh 18,0% yang berasal dari semua komponen kepabeanan dan cukai. Secara lebih rinci, cukai mencapai Rp226,9 triliun atau 103,1% target Perpres 98/2022. Kinerja cukai tumbuh 16,0% yang didorong oleh efektifitas kebijakan (penyesuaian tarif) dan pengawasan serta membaiknya kondisi pandemi terutama relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata. Bea Masuk mencapai Rp51,1 triliun atau 120,6% target Perpres 98/2022. Kinerja bea masuk tumbuh 30,6% dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat sebagai dampak meningkatnya permintaan dalam negeri. Sementara itu, bea keluar mencapai Rp39,8 triliun atau 108,5% target Perpres 98/2022. Kinerja bea keluar tersebut tumbuh 15,2% didorong peningkatan volume ekspor dan harga komoditas terutama produk kelapa sawit dan minerba.

lalu sebesar Rp529,0 triliun, disumbangkan oleh semakin terkendalinya pandemi Covid-19 sehingga kebutuhan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial menjadi lebih kecil. Realisasi belanja barang ini dimanfaatkan antara lain pada: (i) Kemenkes sebesar Rp63,1 triliun untuk a.l. pembayaran klaim pasien, insentif nakes, dan program vaksinasi Covid-19; (ii) Kemenag sebesar Rp21,0 triliun a.l. untuk penyaluran BOS, (iii) Kemenkeu sebesar Rp51,3 triliun a.l. pembayaran selisih harga biodiesel dan pemberian beasiswa LPDP. Selain itu, belanja barang juga dimanfaatkan untuk kegiatan operasional K/L, penyaluran pennebalan perlinsos (a.l. penyaluran bantuan subsidi upah/BSU sebesar Rp7,7 triliun kepada 12,8 juta pekerja dan BLT PKL Warung dan Nelayan sebesar Rp1,3 triliun kepada 2,1 juta orang), dan kegiatan layanan perkantoran.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sebesar Rp238,8 triliun (119,9% terhadap Perpres 98/2022), lebih rendah 0,3% dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sebesar Rp239,6 triliun. Pada tahun lalu terdapat relaksasi pembayaran sebesar Rp18,5 triliun untuk proyek infrastruktur yang selesai di tahun 2020 dan di-*carry over* ke 2021 khususnya pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Realisasi belanja modal tersebut dimanfaatkan a.l. untuk: (1) pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp99,6 triliun, termasuk untuk modernisasi alutsista pada Kemenhan dan Almatsus pada Polri; (2) pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp31,7 triliun termasuk untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan Polri, pembangunan terminal bandara pada Kemenhub, pembangunan rumah susun dan rumah khusus pada Kemen PUPR, dan pembangunan gedung pendidikan tinggi pada Kemenag; serta (3) pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp73,9 triliun, termasuk untuk pembangunan/preservasi jalan/jembatan dan pembangunan bendungan pada Kemen PUPR dan pembangunan jalur kereta api pada Kemenhub.

Kemudian, realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp161,0 triliun (113,1% terhadap Perpres 98/2022), lebih rendah 7,3% dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sebesar Rp173,7 triliun. Tingginya realisasi ini juga disumbangkan oleh tambahan alokasi untuk pelaksanaan program PEN yang bersumber dari realokasi belanja non K/L. Realisasi bantuan sosial ini dimanfaatkan untuk a.l. penyaluran PKH sebesar Rp28,7 triliun kepada 10 juta keluarga, kartu sembako sebesar Rp44,1 triliun kepada 18,8 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp5,9 triliun kepada 19,6 juta penerima, BLT BBM dalam rangka menjaga daya beli masyarakat atas dampak kenaikan harga komoditas sebesar Rp12,3 triliun kepada

20,7 juta penerima manfaat, bantuan premi iuran sebesar Rp43,6 triliun kepada 96,7 juta peserta segmen PBI Program JKN, serta penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama melalui Program Indonesia Pintar bagi sebesar Rp11,1 triliun bagi 20,1 juta siswa dan KIP Kuliah sebesar Rp10,8 triliun kepada 847,7 ribu mahasiswa.

Realisasi belanja Non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2% terhadap Perpres 98/2022), secara nominal meningkat 47,6% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp809,9 triliun, utamanya disumbangkan antara lain oleh percepatan pembayaran kompensasi energi, pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi, dan pembayaran jaminan kesehatan ASN. Kenaikan realisasi tersebut juga disumbangkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mendorong peran APBN sebagai *shock absorber* dengan memanfaatkan tingginya pendapatan negara untuk dapat menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyerapan kenaikan harga komoditas seperti energi dan minyak goreng, serta memberikan fasilitas/insentif kepada dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp386,3 triliun (95,2% terhadap Perpres 98/2022), lebih tinggi 12,5% dari realisasinya tahun lalu sebesar Rp343,5 triliun disebabkan antara lain oleh meningkatnya *yield* SBN tenor 10 tahun sebagai dampak dari sentimen pemulihan ekonomi AS yang ditandai meningkatnya inflasi dan *yield United State Treasury* (UST) dan masih berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan *yield* tersebut berdampak pada biaya pengadaan utang baru dan berdampak pada suku bunga acuan pinjaman. Namun demikian, realisasi pembayaran bunga utang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan targetnya dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp405,9 triliun.

Realisasi Subsidi sebesar Rp252,8 triliun (89,1% terhadap Perpres 98/2022), atau tumbuh 4,4% dibandingkan realisasinya di tahun lalu sebesar Rp242,1 triliun, yang dipengaruhi antara lain oleh respon Pemerintah untuk antisipasi kenaikan harga ICP melalui a.l. kebijakan percepatan pencairan kurang bayar subsidi LPG 3 kg dan BBM. Penyaluran subsidi energi sebesar Rp171,9 triliun, atau meningkat 22,4% terhadap realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp140,4 triliun. Kinerja penyaluran subsidi energi tahun 2022 adalah sebagai berikut: penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 16,5 juta kilo liter dan LPG 3 kg sebanyak 7,3 juta metrik ton, serta penyaluran subsidi listrik kepada 38,9 juta pelanggan. Penyaluran subsidi non energi sebesar Rp81,0 triliun, a.l. dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi bunga KUR kepada 7,6 juta debitur,



penyaluran pupuk bersubsidi 7,4 juta ton dan penyaluran subsidi perumahan untuk 226,0 ribu unit rumah. Selanjutnya, realisasi belanja Non K/L termasuk untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp379,3 triliun dalam rangka memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat serta penyaluran Kartu Prakerja sebesar Rp16,4 triliun kepada 5,0 juta peserta yang dimanfaatkan untuk bantuan biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi.

Memperhatikan kinerja Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022, maka dalam pengelolaan APBN tahun 2023 Pemerintah perlu mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada K/L untuk mengoptimalkan penyerapan belanja K/L mulai awal tahun, percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBN, serta memastikan setiap rupiah dari APBN dapat memberikan dampak kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, langkah efisiensi dalam perumusan alokasi belanja perlu terus diperkuat mengingat target defisit dalam APBN mulai tahun 2023 akan kembali ke batasan defisit 3% PDB di tengah masih relatif tingginya risiko ketidakpastian yang dihadapi.

REALISASI TKD 2022 TUMBUH POSITIF DIPENGARUHI OLEH PENINGKATAN KEDISIPLINAN PEMDA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN PENYALURAN TKD

Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Desember 2022 telah tersalurkan sebesar Rp816,2 triliun atau 101,4% dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,9% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp785,7 triliun (98,8%). Realisasi penyaluran TKDD tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otsus serta pelaksanaan program BLT Desa.

REALISASI PENYALURAN TKDD S.D 31 DESEMBER 2021-2022 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2021			2022		
	APBN	LKPP	%	Perpres 98/2022	Real 31 Des	%
A. TRANSFER KE DAERAH	723.479,5	713.853,9	98,7	736.780,5	748.329,1	101,6
I. DANA PERIMBANGAN	688.676,6	679.586,7	98,7	708.024,2	719.579,2	101,6
A. DANA TRANSFER UMUM	492.253,0	494.948,4	100,5	518.430,4	546.414,1	105,4
1. DANA BAGI HASIL	101.961,6	117.157,0	114,9	140.430,4	168.414,1	119,9
2. DANA ALOKASI UMUM	390.291,4	377.791,4	96,8	378.000,0	378.000,0	100,0
B. DANA TRANSFER KHUSUS	196.423,5	184.638,3	94,0	189.593,8	173.165,0	91,3
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,2	57.069,7	87,5	60.874,0	54.784,0	90,0
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	131.175,3	127.568,6	97,3	128.719,8	118.381,1	92,0
a.1 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.459,1	52.568,1	98,3	54.108,3	51.346,1	94,9
2 BOP PAUD	4.014,7	4.007,5	99,8	4.254,9	3.737,3	87,8
3 BOP Pendidikan Kesetaraan	1.195,3	1.182,2	98,9	1.022,2	996,7	97,5
4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.360,4	54.635,2	98,7	51.990,5	46.547,8	89,5
5 Bantuan Operasional Kesehatan & KB	12.700,5	11.685,8	92,0	12.692,9	12.317,3	97,0
II. DANA INSENTIF DAERAH	13.500,0	13.464,3	99,7	7.000,0	6.993,7	99,9
III. DANA OTSUS & DANA KEISTIMEWAAN D.I.Y	21.302,9	20.802,9	97,7	21.756,3	21.756,3	100,0
A. Dana Otonomi Khusus	19.982,9	19.482,9	97,5	20.436,3	20.436,3	100,0
1. Dana Otsus Prov. Papua & Prov. Papua Barat	7.805,8	7.555,8	96,8	8.505,0	8.505,0	100,0
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.805,8	7.555,8	96,8	7.560,0	7.560,0	100,0
3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur	4.371,3	4.371,3	100,0	4.371,3	4.371,3	100,0
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.320,0	1.320,0	100,0	1.320,0	1.320,0	100,0
B. DANA DESA	72.000,0	71.853,7	99,8	68.000,0	67.906,1	99,9
J U M L A H	795.479,5	785.707,6	98,8	804.780,5	816.235,2	101,4

DBH sampai dengan 31 Desember 2022 telah disalurkan sebesar Rp168,4 triliun (119,9%), yang bersumber dari penyaluran DBH Pajak sebesar Rp67,6 triliun dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp100,8 triliun. Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi adanya tambahan untuk penyelesaian kurang bayar (KB) DBH dan tambahan pagu DBH menyesuaikan dengan realisasi penerimaan yang dibagihasilkan. Selanjutnya, realisasi penyaluran DAU mencapai Rp378,0 triliun (100,0%), hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 96,8%, yang dipengaruhi oleh kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp54,8 triliun (90,0%) atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar 87,5% antara lain

karena adanya percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 dan peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur. Sementara itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp118,4 triliun (92,0%), sementara pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 97,3%. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya perhitungan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 dan 2021 pada penyaluran tahap II dan tahap III untuk memaksimalkan sisa dana BOS yang terdapat di rekening sekolah. Adapun sampai dengan 31 Desember 2022 seluruh jenis dana DAK Nonfisik telah disalurkan kepada daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi penyaluran DID sebesar Rp7,0 triliun (99,9%), sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 99,7%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kecepatan

penyampaian dokumen syarat salur oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, realisasi Dana Keistimewaan D.I.Y serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan DTI Otsus telah tersalurkan seluruhnya sebesar Rp21,8 triliun (100,0%) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,7% yang dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola Dana Otsus sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 76/PMK.07/2022, dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2022 telah disalurkan sebesar Rp67,9 triliun (99,9%), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 99,8%. Hal tersebut utamanya disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan tahun 2021.

Selain itu, pada tahun 2022 juga terdapat kebijakan penyaluran BLT Desa yang dapat dilakukan tiga bulan sekaligus, sementara pada periode tahun 2021 penyaluran BLT Desa dilakukan secara bulanan. Selanjutnya, realisasi penyaluran program BLT Desa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp26,9 triliun dengan sasaran sebanyak 7,5 juta KPM.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga BBM pada tahun 2022, Pemerintah

mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum yang terdiri atas DAU dan DBH. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yang antara lain digunakan untuk: (i) bantuan sosial termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan; (ii) penciptaan lapangan kerja di daerah; dan (iii) pemberian subsidi transportasi umum.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan TKDD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TKDD di daerah. Selain itu, guna mengurangi adanya dana mengendap di kas daerah (*idle cash*), Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran berbasis kinerja untuk beberapa jenis dana TKDD, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5% dari Perpres 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun. Jumlah ini secara nominal turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,6% dari targetnya. Hal ini terutama diakibatkan oleh penurunan realisasi SBN neto, pembiayaan investasi, dan Pembiayaan Lainnya.

Realisasi pembiayaan utang pada tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun (73,0% dari targetnya dalam Perpres 98/2022). Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp870,5 triliun atau 73,9% dari pagu tahun 2021. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan utang disebabkan oleh penurunan SBN neto. Penurunan SBN ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan saldo kas yang masih tinggi. Tahun 2022 angka SBN neto yang tinggi disebabkan tingginya kebutuhan pembiayaan utang.

Terkait pinjaman dalam negeri (PDN) neto, realisasi penarikan pinjaman sebesar Rp7,1 triliun (198,3% dari pagunya), sedangkan untuk pembayaran cicilan pokok PDN terealisasi Rp1,9 triliun atau 105,3% dari pagunya. Pinjaman luar negeri (PLN) neto terdapat realisasi Rp24,5 triliun yang berasal dari penarikan pinjaman Rp103,8 triliun (163,4% dari pagu) dan pembayaran cicilan pokok PLN Rp79,3 triliun (95,5% dari pagu). Penarikan PLN lebih tinggi Rp29,7 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya antara lain karena pada tahun 2022 pemerintah melakukan penarikan pinjaman tunai/program yang telah disiapkan dari tahun 2021.

Untuk pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp2,3 triliun (388,6% dari pagu Perpres 98/2022) atau lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,9 triliun (433,0% dari pagunya). Selain lebih tinggi secara yoy, realisasi pemberian pinjaman (neto) hingga Desember 2022 juga telah melampaui pagunya. Lebih tingginya realisasi pemberian pinjaman (neto) sampai Desember 2022 dibandingkan pagunya dikarenakan tingginya realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp3,9 triliun (92,9% dari targetnya), dibandingkan realisasi penerusan pinjaman yang sebesar Rp1,6 triliun (44,5% dari targetnya). Rendahnya realisasi penerusan pinjaman ini dikarenakan rendahnya kebutuhan penarikan pinjaman sampai dengan akhir tahun 2022.

Kemudian, realisasi pembiayaan investasi pada tahun 2022 mencapai Rp106,8 triliun. Realisasi ini berasal dari pencairan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial/SMF sebesar Rp2,0 triliun, PT Utama Karya sebesar Rp31,4 triliun, PT PLN sebesar Rp5,0 triliun, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp3,2 triliun, PT Waskita Karya sebesar Rp3,0 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,1 triliun, PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp2,5 triliun, PT Adhi Karya sebesar Rp1,98 triliun, PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun, Perum Perumnas sebesar Rp1,6 triliun, Bank Tanah sebesar Rp500 miliar, serta Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional sebesar Rp1,1 triliun. Selain itu, terdapat investasi dana bergulir kepada BLU melalui BLU LPDP sebesar Rp20,0 triliun, BLU LMAN sebesar

2,8 triliun, BLU LDKPI sebesar Rp1,0 triliun, dan BLU BPD LH sebesar 3,0 triliun.

Kemudian investasi pemerintah non-permanen terealisasi juga melalui Program FLPP sebesar Rp19,1 triliun dan PT PN III Rp1,2 triliun. Di sisi lain, terdapat juga realisasi penerimaan kembali investasi yang berasal dari rekonsiliasi belanja modal pengadaan tanah PSN oleh LMAN sebesar Rp16,0 triliun, pengembalian pinjaman PEN Daerah sebesar Rp2,3 triliun, pengembalian IP PEN PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun, pengembalian IP PEN PT PN III sebesar Rp1,2 triliun, serta pengembalian dana bergulir BLU BPJT sebesar Rp22,0 miliar. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan investasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp142,5 triliun.

Terkait alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2022 telah terealisasi seluruhnya (100,0% dari alokasinya dalam Perpres 98/2022) dengan dilakukan pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp1,1 triliun, yang terdiri atas alokasi untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp0,3 triliun dan alokasi dukungan penjaminan pada program PEN sebesar Rp0,8 triliun. Capaian realisasi tahun 2022 tersebut sama dengan capaian realisasi pada tahun 2021 (terrealisasi 100,0% dari alokasinya sebesar Rp2,7 triliun). Adapun total saldo rekening dana cadangan penjaminan pemerintah saat ini adalah sebesar Rp11,9 triliun yang terdiri atas saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11,5 triliun dan saldo Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp0,4 triliun, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan dalam rangka memitigasi risiko *default*.

Mengenai alokasi pembiayaan lainnya, terdapat realisasi penerimaan pembiayaan dari hasil pengelolaan aset (HPA) sebesar Rp667,1 miliar. Sementara itu, alokasi penggunaan SAL tahun 2022 sesuai Perpres 98/2022 sebesar Rp127,3 triliun tidak digunakan. Hal tersebut menyebabkan realisasi pembiayaan lainnya pada tahun 2022 lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp56,8 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2022 yang lebih rendah dari pagu Perpres 98/2022 secara umum disebabkan pengendalian utang akibat saldo kas yang masih tinggi dan tidak terealisasinya pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan.